

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN SIX PARTY TALKS DALAM MENYELESAIKAN KRISIS NUKLIR KOREA UTARA

Bab ini merupakan ruang dimana penulis akan melakukan pembahasan secara teoritik atas karya tulis yang diajukan berjudul Kegagalan Six Party Talks dalam Menyelesaikan Krisis Nuklir Korea Utara. Penulis akan menjelaskan secara dalam apa yang menyebabkan kegagalan Six Party Talks dalam menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara.

Teori Efektifitas Rezim yang digagas oleh Arlid Underdal menjadi teori tunggal yang digunakan penulis untuk mengupas tuntas tema tersebut. Diplomasi multilateral seperti *Six Party Talks* sedianya dapat menjadi pemicu bagi keberlangsungan proses denuklirisasi di Korea Utara.

Setelah beberapa pihak mengupayakan denuklirisasi Korea Utara melalui Six Party Talks namun tetap saja sampai saat ini belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, Six Party Talks dikatakan belum berhasil karena Korea Utara masih mengembangkan nuklirnya dan melakukan serangkaian Uji coba nuklir yang dapat mengancam stabilitas kawasan maupun internasional. Disini penulis akan mencoba menjabarkan apa saja yang menjadi faktor penyebab kegagalan Six Party Talks dalam menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara.

A. Problem Malignancy sebagai penghambat Six Party Talks

Menurut Arild Underdal, Efektif apa tidaknya sebuah rezim dilihat dari seberapa rumit problem atau masalah yang dihadapi, jika masalah nya rumit atau malign, maka tingkat keefektifitasan rezim tersebut akan semakin kecil¹. Melihat pada kasus krisis nuklir Korea Utara ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi problem malignancy didalam tubuh Six Party Talks.

Alasan kuat yang membuat penulis yakin bahwa telah terjadi malignancy adalah karena banyaknya aktor – aktor besar yang berada didalam tubuh rezim Six Party Talks, aktor itu adalah anggota Six Party Talks itu sendiri, yaitu Amerika Serikat, China, Russia, Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan. Malignancy disini juga dipengaruhi karena adanya warisan sejarah dari kedua negara besar yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat yang mewariskan ideologi liberalisme dan komunisme kepada Korea Selatan dan Korea Utara.

Kehadiran Negara Negara besar disana menimbulkan banyaknya polemik dan permasalahan internal akibat perbedaan kepentingan. Masing masing dari Negara tersebut memiliki kepentingan nasional nya yang harus dipertahankan selama forum Six Party Talks berlangsung dari tahun 2003 – 2009. Untuk lebih jelas nya penulis akan mencoba menjelaskan apa saja kepentingan Negara tersebut selama berada di forum Six Party Talks.

¹ Edward L. Miles, Arild Underdal, et al, (2002), *Environmental Regime Effectiveness : Confronting Theory with Evidence*, London: The MIT Press, hlm. 2

1. Kepentingan Amerika Serikat

Amerika Serikat sebagai Negara adidaya sudah selayaknya menjadi Negara yang dapat menjaga keamanan dan kestabilan dunia internasional, namun pada faktanya setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir nya, Amerika Serikat dianggap gagal dalam menyelesaikan krisis nuklir yang terjadi.

Korea Utara selama ini memang dianggap sebagai negara poros kejahatan oleh Amerika Serikat dan mereka juga selalu menunjukkan sikap permusuhan nya kepada Korea Utara, tak heran jika Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir dalam rangka strategi rezim survive.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Amerika Serikat melakukan upaya sangat keras untuk menyelesaikan krisis nuklir yang ada di Semenanjung Korea. Pada dasarnya, tujuan Amerika Serikat di Asia Timur berada pada level yang konsisten selama lima dasawarsa terakhir. Setidaknya terdapat empat tujuan utama Amerika Serikat atas Asia Timur, yakni mencegah munculnya hegemoni regional, tetap membuka jalur laut dan udara (*Transit Area*), menjaga akses komersial wilayah perekonomian wilayah dan perdamaian, serta stabilitas yang diperlukan dalam perdagangan².

Amerika Serikat sangat paham bahwasanya program pengembangan nuklir Korea Utara sangat membahayakan stabilitas kawasan Asia Timur, pada satu sisi Amerika Serikat harus menjaga keamanan aliansi dari mereka di kawasan tersebut

² Dosch, Jorn. 2004. "The United States in the Asia Pacific", in Michael K Connors, Remy Davidson, Jorn Dosch (eds), *The New Global Politics of the Asia-Pacific*. hlm. 17-34.

yaitu Korea Selatan dan Jepang, karena pada paska perang dingin kedua Negara tersebut memang telah diberi amanah untuk menjaga keamanan dan stabilitas regional Asia Timur.

Amerika Serikat menjalin kerjasama Mutual Security dengan Jepang dan Korea Selatan untuk mencegah terjadinya Regional Hegemon di kawasan Asia Timur³, maka dari itu AS bertanggung jawab untuk ikut menjaga keamanan Negara aliansi nya tersebut dari ancaman program pengembangan nuklir Korea Utara.

Six Party Talks adalah sarana untuk menuju Semenanjung Korea yang lebih aman dan stabil, Amerika Serikat sangat berhasrat untuk membuat Korea Utara menonaktifkan dan membongkar semua fasilitas nya. Dengan segala macam cara Amerika Serikat dan anggota Six Party Talks yang lain nya mencoba melakukan negosiasi dengan Korea Utara agar tercapainya kesepakatan yang menguntungkan untuk semua.

Namun disinilah malignancy terjadi menurut penulis, Amerika Serikat tidak senang jika sampai reunifikasi antara Korea Utara dan Selatan terjadi, karena itu akan membuat kehadiran Amerika Serikat dikawasan Asia Timur tidak lagi diperlukan. Amerika Serikat ingin teteap bisa berada di Asia Timur untuk menunjukkan hegemoni nya sebagai negara adidaya. Selain itu jika perdamaian di Semenanjung terjadi maka pemasukan AS dari penjualan senjata akan berkurang, karena pada faktanya selama

³ Japan-U.S. Security Treaty, <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html> Diakses pada 8/1/2017 Pukul 3:55.hlm 18 – 27.

ini penjualan utama Alutsista AS berupa rudal dan system anti rudal dan pesawat tempur paling banyak terjual ke Korea Selatan dan Jepang.

Amerika Serikat mendapatkan banyak keuntungan dari banyaknya konflik yang terjadi di kawasan Asia Timur. Transaksi jual beli senjata pada 2011 dikuasai oleh Amerika Serikat dengan total nilai 66,3 Milyar dolar⁴.

2. Kepentingan Korea Utara

Korea Utara memanfaatkan Six Party Talks sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Korea Utara sadar bahwa ia bukanlah sebuah Negara yang sudah bisa mencukupi kebutuhan nasional nya, selain itu minimnya sumber daya alam juga menjadi kendala. Dengan alasan tersebut Korea Utara memakai fasilitas nuklir yang dimilikinya untuk mengeruk keuntungan dari Negara – Negara yang resah akan pengembangan nuklir nya.

Pada tahun 1994 setelah Korea Utara menyetujui pembongkaran fasilitas nuklir skala ringan nya oleh IAEA, Korea Utara mendapatkan imbalan 50.000 ton solar yang akan ditambah lagi jika Korea Utara bersedia membongkar kembali fasilitas nuklir miliknya. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa sebenarnya Korea Utara tidak benar – benar niat untuk melakukan denuklirisasi, yang Korea Utara lakukan selama ini hanya memperkuat dan mempertahankan kepentingan nasional nya. Semua ini dilakukan karena desakan dari berbagai pihak juga yang memaksa Korea Utara menjadikan nuklir sebagai senjata dalam agenda rezim survive.

⁴ Penjualan senjata Amerika ke Asia bakal melonjak <http://www.antaraneews.com/berita/351198/penjualan-senjata-amerika-ke-asia-bakal-melonjak> Diakses pada 8/1/2017 Pukul 21:55

3. Kepentingan Rusia

Rusia memang tidak bisa lepas dari Korea Utara, sejak jaman Uni Soviet dulu mereka sudah banyak membantu Korea Utara dengan transfer teknologi pengembangan nuklir yang efeknya sampai saat ini masih terasa oleh Korea Utara. Transfer ilmu memang dinilai penting oleh Rusia, karena Korea Utara adalah sebagai teman lama dari Rusia yang mempunyai kesamaan yaitu anti negara barat. Selain itu Rusia senang membantu Korea Utara karena ada kepentingan bahwa mereka dapat mencegah serangan atau ancaman dari Amerika Serikat atau aliansi nya yang berada di Asia Timur.

Rusia memiliki dua kepentingan dalam membangun aliansi dengan Korea Utara, yaitu untuk mengimbangi pengaruh Jepang dan Amerika Serikat di Semenanjung Korea dan melakukan denuklirisasi Korea Utara⁵. Peran Rusia dalam forum Six Party Talks memang sedikit berbeda dengan Amerika Serikat dan Jepang.

Pendekatan yang dilakukan oleh Rusia juga cenderung tidak terlalu menekan kepada Korea Utara, mereka hanya melakukan peringatan dan memberikan sanksi yang berat kepada Korea Utara. Disini sangat terlihat sekali bahwa sebenarnya Rusia juga membutuhkan sosok Korea Utara yang kuat untuk mencegah hegemon Amerika Serikat di Semenanjung Korea.

⁵ Korea Utara inginkan hubungan yang lebih baik dengan Rusia.
<http://www.internasional.kompas.com/korut.inginkan.hubungan.lebih.baik.dengan.rusia.html> Diakses pada 8/1/2017 Pukul 22:55

4. Kepentingan China

China memang memiliki peranan penting bagi perkembangan nuklir Korea Utara pada awal kemerdekaan hingga pecahnya Perang Korea pada 1950. Namun krisis nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea memang membuat China terganggu, China yang dikenal saat ini dengan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi merasa terganggu dengan adanya krisis yang terjadi.

Kesamaan ideologi yang dimiliki oleh China dan Korea Utara membuat hubungan kedua negara lebih dari sekedar hubungan perdagangan atau bisnis. China memang saat ini menganggap bahwa Korea Utara adalah satu – satunya rekan mereka yang masih setia pada ideologi komunis. Korea Utara juga telah lama menggantungkan ekonominya terhadap bantuan dari China⁶.

China memang adalah salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, China juga bahkan adalah salah satu aktor yang ikut menyusun segala macam sanksi yang ditujukan kepada Korea Utara, namun sebenarnya inti dari semua itu adalah bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada Korea Utara, namun hanya sekedar untuk menyadarkan dan membuat Korea Utara memikirkan kembali atas tindakan yang telah dilakukannya.

Sebenarnya China juga sangat menginginkan kembali bersatunya Korea Selatan dan Korea Utara, selain akan membuat keadaan yang lebih baik di Semenanjung Korea, kembali bergabungnya mereka dapat meningkatkan

⁶ Riris Indah Sari, "Perubahan Sikap Cina atas Sanksi Dewan Keamanan PBB Terhadap Nuklir Korea Utara," eJournal Hubungan Internasional, Vol. 3 No. 4, 2015, hlm. 1186

pertumbuhan ekonomi China dengan terbukanya pasar – pasar baru untuk produk China. Pertumbuhan ekonomi China yang saat ini memang sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam 10 tahun terakhir memang menjadi momentum yang baik untuk meneruskan hegemoni China dikawasan tersebut⁷.

Namun sepertinya keinginan China mengalami hambatan karena kembali Amerika Serikat sangat tidak menginginkan adanya reunifikasi karena dapat melemahkan hegemon mereka di kawasan Asia Timur. Dengan hadirnya China dalam Six Party Talks, China dapat mencegah untuk terjadinya Perang Korea edisi kedua yang sudah pasti akan banyak merugikan banyak pihak, ditambah tingkat persenjataan yang sudah lebih maju akan membuat tingkat kerusakan yang akan semakin luas dan parah.

5. Kepentingan Jepang

Jepang sebagai satu – satunya negara yang pernah merasakan bom atom yang sangat dahsyat merasa bahwa adanya pembangunan kapabilitas militer terutama rudal balistik dan nuklir di kawasan adalah ancaman serius bagi negaranya. Kondisi ini mengharuskan Jepang menjaga perdamaian dengan cara kolaborasi internasional sebagai dasar keamanan nasional melalui stabilisasi kehidupan rakyat dan membangun kapabilitas pertahanan serta kerjasama dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Jepang mendapatkan banyak kerugian atas pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, terutama pada sektor perekonomian yang

⁷ Pertumbuhan Ekonomi Cina Naik <http://www.mahadanws.com/3rd/index.php/economy/asia/21002-pertumbuhan-ekonomi-cina-naik-95-di-2010-ekonom-negara> Diakses pada 22/06/2017 Pukul 0:33

diakibatkan banyaknya pelaku nusaha atau investor yang membatalkan investasinya di Asia Timur akibat keadaan kemanan yang mengancam⁸.

Beberapa kebijakan nasional pertahanan Jepang lainnya adalah memajukan kebijakan pertahanan eksklusif, tidak menjadi kekuatan militer yang dapat mengancam dunia, tidak mengembangkan senjata nuklir, mengintensifkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat serta membangun kapabilitas defensif dalam batas-batas tertentu.

Jepang sebenarnya merasa terancam oleh keberadaan dan pengembangan nuklir Korea Utara dan Jepang juga disini bertindak sebagai aliansi Amerika Serikat yang sudah pasti mendukung langkah – langkah AS untuk melakukan pembongkaran fasilitas nuklir milik Korea Utara serta menghendaki pergantian rezim Korea Utara yang berkuasa agar Korea Utara segera mengakhiri program nuklirnya.

6. Kepentingan Korea Selatan

Korea selatan sebagai Negara yang langsung bersebelahan dengan Korea Utara tentu saja memiliki kekhawatiran yang lebih dalam krisis nuklir yang terjadi di semenanjung korea. Sejak kedua Negara tersebut berpisah pada tahun 1945, kedua Negara tersebut memang sudah ditunggangi oleh dua ideology yang berbeda.

Namun yang penulis lihat sesungguhnya korea selatan hanya ingin Korea Utara melakukan denuklirisasi kepada semua fasilitas nuklir nya, agar kedamaian di

⁸ Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, Peran Nuklir Korea Utara SEbagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional., hlm. 3

Semenanjung Korea bisa tercipta. Berbagai macam cara sudah dilakukan untuk mewujudkannya, sebagai contoh:

Pada tahun 1990, Korea Selatan atas inisiatif presiden Korea Selatan saat itu, Roh Tae Woo, mengusulkan untuk membangun kerjasama yang lebih komprehensif dengan Korea Utara meliputi kerjasama ekonomi (*inter-Korean trade*) dan upaya reunifikasi dua Korea⁹. Hasil yang positif ditunjukkan ketika akhirnya Korea Utara bersedia menerima inspeksi dari badan atom internasional IAEA pada tahun 1992.

Berbagai macam upaya telah dilakukan baik oleh pihak Korea Selatan maupun Amerika Serikat namun lagi – lagi yang terjadi Korea Utara kembali melanggar segala perjanjian yang telah disepakati. Akibatnya sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi di Semenanjung Korea.

7. Rezim Survival

Keberadaan pasukan militer milik Amerika Serikat di wilayah Jepang dan Korea Selatan memang membuat Korea Utara merasa terancam dan dikelilingi oleh musuh. Korea Utara merasa bahwa Amerika bisa saja berada di wilayah tersebut untuk mengawasi pergerakan Korea Utara. Dan bukan tidak mungkin Amerika melakukan penyerangan dengan militernya jika pergerakan Korea Utara tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginan mereka.

Hal ini memang sudah pernah dialami oleh China yang mengalami ancaman serangan nuklir oleh Amerika Serikat. China saat itu mengalami ancaman nuklir

⁹ Quo Vadis Six Party Talks http://www.kompasiana.com/m.fachri/quo-vadis-six-party-talks_54ff1ea9a33311ea4550f90d Diakses pada 22/06/2017 Pukul 2:33

sebanyak tiga kali oleh Amerika pada tahun 1950-an. Namun akhirnya ketika China berhasil melakukan uji coba nuklir nya pada tahun 1964 hubungan kedua Negara tersebut berangsur membaik dan Amerika kembali menghormati hubungan bilateral antara mereka.

Atas pengalaman yang pernah dialami oleh China, Korea Utara menyimpulkan bahwa satu – satunya hal yang bisa membuat Amerika sedikit lebih tenang dan menghormati kedaulatan Korea Utara adalah militer.yang dimaksud militer disini adalah kepemilikan senjata nuklir sebagai senjata pemusnah masal. Amerika Serikat adalah Negara adikuasa yang saat ini hampir mengontrol semua hal yang terjadi di dunia, maka dari itu Korea Utara merasa bahwa tidak ada turan atau hukum internasional yang dapat melindungi Korea Utara dari Amerika selain dirinya sendiri. Ditambah lagi Korea Utara yang telah dicap sebagai Negara Axis of evil oleh Amerika¹⁰, hal ini membuat keamanan Korea Utara semakin terancam.

Korea Utara beranggapan bahwa kepemilikan senjata nuklir atau senjata pemusnah masal dapat menajamin keamanan dan kelangsungan jalan nya Negara. Alasan regime survive yang dilakukan oleh Korea Utara ini menambah panjang daftar Malignacy yang menjadi penyebab kegagalan Six Party Talks dalam menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara.

¹⁰ Zain Maulana, “The Threat of a Nuclear-Armed North Korea and The Possibility of Solution,” *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 2012, hal. 190-191.

8. Ideologi Juche

Salah satu motif Korea Utara dalam pengembangan nuklir karena terinspirasi oleh gagasan Juche dan Songun dimana militer memiliki prioritas khusus. Salah satu prioritas tersebut diantaranya bahwa senjata merupakan garis hidup negara dan sumber kemenangan revolusi.¹¹ Ideologi Juche sendiri adalah salah satu warisan dan sejarah perkembangan Negara Korea Utara. Juche adalah pada dasarnya ideologi yang membuat Korea Utara menjadi Negara yang mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun¹².

Juche menjelaskan tentang prinsip pertahanan dan pencapaian kebebasan rakyat dan negara, prinsip penguatan mengendalikan kekuatan revolusi dan meningkatkan perannya, serta prinsip memahami pikiran rakyat sebagai faktor utama dalam revolusi dan pembangunan. Hal tersebut, membuat Korea Utara menyadari bahwa untuk menjadi bangsa dan negara yang maju dan kuat, maka diperlukan kekuatan serta semangat untuk mencapai dan mempertahankan tujuan tersebut. Terutama bertahan dari serangan luar yang mungkin menghambat revolusi dan pembangunan di Korea Utara.

Bagi Korea Utara sebuah negara harus memiliki kekuatan yang dapat memperkokoh kualitas negaranya. Agar dapat membuktikan persepsi tersebut, maka Korea Utara fokus dalam peningkatan kekuatan militer. Hal ini dibutuhkan untuk

¹¹ Silvia Intan Febriani. "PENGARUH IDEOLOGI JUCHE TERHADAP PEREKONOMIAN KOREA UTARA: PADA MASA KEPEMIMPINAN KIM JONG-II

¹¹ Repository UMY, 2017, hlm 55

¹² Ibid

pertahanan negara, dimana pertahanan militer ini dipersiapkan untuk mempertahankan Korea Utara jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Hal ini dibuktikan dengan program pengembangan nuklir nya yang tidak kenal henti walaupun program nuklirnya walaupun program ini terus menurus mendapat berbagai kecaman dari berbagai pihak.

B. Problem Solving Capacity

Dari berbagai kepentingan Negara diatas penulis menyimpulkan bahwa rezim Six Party Talks dapat dikatakan mengalami problem malignancy yang serius. Menurut Underdal sebuah rezim dikatakan malign jika memiliki tiga karakter yaitu antara lain Incongruity, Asymmetry dan Cumulative Cleavages¹³

Menurut Underdal, permasalahan dapat diselesaikan dan diatasi apabila ditangani oleh lembaga atau sistem dengan power yang kuat serta didukung oleh adanya skill dan keterampilan yang memadai¹⁴. Setidaknya dalam Problem Solving Capacity terdapat tiga unsur yaitu:

- a) Pengaturan kelembagaan
- b) Distribusi kekuasaan
- c) Keterampilan dan energi yang tersedia untuk memecahkan masalah yang ada

Dari teori yang diatas dapat kita simpulkan bahwa efektif atau tidaknya sebuah rezim dapat dilihat dari seberapa baik rezim atau lembaga tersebut dapat mengelola anggota atau member dari rezim tersebut. Perkembangan diplomasi pada

¹³ Underdal, Arild. Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence. (Online) <http://books.google.co.id/books?id=HkOFtdbSZL8C>, Diakses pada 8/1/2017 Pukul 2:45.hlm 18-27

¹⁴ Ibid. hlm. 23-37

abad 20 memang diwarnai dengan munculnya berbagai diplomasi multilateral yang kerap menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah atau krisis internasional.

Sebuah proses diplomasi multilateral umumnya diawali dengan memfokuskan forum pada akar permasalahan yang akan dibahas, sehingga peserta atau para anggota forum dapat memfokuskan pikiran pada satu isu. Hal ini dinilai sangat penting karena dapat mendorong para anggota untuk menyelesaikan masalah dengan solusi yang baik untuk semua pihak. Pengaturan lembaga secara resmi serta aturan hukum yang mengikat juga wajib diterapkan dalam rangka mencapai tujuan berdirinya forum tersebut.

Six party talks adalah salah satu contoh diplomasi multilateral yang berupaya dalam menyelesaikan krisis nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea. Namun sampai saat ini memang Six Party Talks belum mendapatkan apa yang diharapkan yaitu denuklirisasi Korea Utara. Ditinjau dari teori efektifitas rezim oleh Alrid Underdal, hal ini dapat terjadi karena Six Party Talks adalah sebuah forum atau lembaga non formal yang tidak memiliki pengaturan kelembagaan yang baik dan aturan hukum yang mengikat untuk para anggotanya.

Six party talks berdiri secara sementara yang dikarenakan kekhawatiran atas program nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara, Six Party Talks juga tidak memiliki aturan legal yang mengikat secara hukum, artinya para anggota Six Party Talks tidak terikat secara hukum atas apa yang telah menjadi keputusan didalam pertemuan Six Party Talks. Dan forum Six Party Talks juga tidak dapat menjatuhkan

sanksi kepada siapa yang melanggar karena kembali pada bentuk Six Party Talks yang tidak resmi atau hanya sementara.

Hal inilah yang menjadi penghambat berkembangnya perundingan Six Party Talks untuk mewujudkan denuklirisasi Korea Utara. Akibat dari hal tersebut dapat kita lihat dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak Korea Utara selama menjadi anggota Six Party Talks. Pada tahun 2006 perundingan sempat terhenti karena para anggota merasa kecewa atas uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Anggota Six Party Talks menilai bahwa uji coba tersebut dapat menjadi sebuah penghambat keberlangsungan forum Six Party Talks.

Menanggapi sikap Korea Utara yang tidak patuh atas beberapa kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya, forum tidak dapat berbuat apa – apa kecuali teguran dan sanksi finansial berupa pemotongan insentif atau bantuan ekonomi kepada Korea Utara. Penulis merasa bahwa hal ini tidak akan membuat Negara semacam Korea Utara menjadi jinak dan patuh.

Six party Talks juga menjadi kian lemah ketika tidak adanya actor dominan yang benar – benar ingin menyelesaikan krisis ini secara fair dan adil. Amerika Serikat yang sangat menggebu untuk mewujudkan denuklirisasi Korea Utara ternyata masih bersikap arogan karena enggan mencabut sikap permusuhan nya kepada Korea Utara.

Memang tidak bisa dikatakan salah jika Korea Utara tidak bersedia melucuti fasilitas nuklir nya karena Korea Utara takut akan kekuatan Amerika. Bagi Korea

Utara program nuklir tersebut menjadi sebuah kebutuhan Korea Utara untuk mempertahankan negaranya dari kemungkinan ancaman yang datang. Hal ini terbukti ketika Korea Utara melanggar kesepakatan dan mulai mengembangkan kembali program nuklirnya.